

**INSIDEN PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL**

***THE SHOOTING INCIDENT INVOLVING INDONESIAN NATIONALS IN MALAYSIA AND
ITS IMPLICATIONS FOR STATE RESPONSIBILITY UNDER INTERNATIONAL LAW***

Evi Febri Sartika¹, Rizki Tri Anugrah Bhakti², Dwi Afni Maileni³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia³

evifebrisartika98@fh.unrika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas respons diplomatik Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Malaysia di Selangor, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional. Tujuan utama kajian adalah untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada Malaysia serta menelaah fungsi diplomasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji sumber hukum internasional, dokumen resmi, dan data sekunder lainnya. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia telah menempuh jalur diplomatik melalui penyampaian nota protes, pemberian pendampingan hukum oleh KBRI, serta intensifikasi komunikasi bilateral. Namun demikian, tanggapan Malaysia cenderung bersifat formalistik tanpa mencerminkan komitmen substantif terhadap prinsip akuntabilitas hukum. Kondisi ini menimbulkan implikasi negatif terhadap perlindungan HAM, kepercayaan publik, dan hubungan bilateral. Sebaliknya, respons yang lebih kooperatif dari Malaysia berpotensi memperkuat hubungan diplomatik dan menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan keterbatasan mekanisme diplomasi bilateral dalam menuntut akuntabilitas negara, serta pentingnya penguatan kerangka kerja sama internasional dalam penegakan HAM lintas batas negara.

Kata Kunci : Warga Negara Indonesia, Negara, Hukum Internasional

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Indonesia's diplomatic response to the shooting incident of Indonesian citizens (WNI) by Malaysian security forces in Selangor, which is considered a violation of the principles of Human Rights (HAM) in international law. The main objective of the study is to assess the form of accountability that can be imposed on Malaysia and to examine the function of diplomacy as an instrument for resolving disputes between countries. Using a normative legal approach, this study examines sources of international law, official documents, and other secondary data. The findings show that Indonesia has taken the diplomatic route by submitting a protest note, providing legal assistance by the Indonesian Embassy, and intensifying bilateral communication. However, Malaysia's response tends to be formalistic without reflecting a substantive commitment to the principle of legal accountability. This condition has negative implications for human rights protection, public trust, and bilateral relations. Conversely, a more cooperative response from Malaysia has the potential to strengthen diplomatic relations and guarantee protection for migrant

workers. This study emphasizes the limitations of bilateral diplomatic mechanisms in demanding state accountability, as well as the importance of strengthening the framework of international cooperation in enforcing human rights across borders

Keywords: Indonesian Citizens, State, International Law

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah serta merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain kekayaan alamnya, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar, yang menjadi salah satu karakteristik khas bangsa ini. Banyak warga Indonesia yang memilih untuk merantau ke luar negeri demi mendapatkan penghasilan, salah satunya ke negara tetangga, Malaysia. Letak geografis Malaysia yang dekat dengan Indonesia membuat mobilitas antar kedua negara menjadi relatif mudah dan cepat. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah besar tenaga kerja Indonesia memilih Malaysia sebagai tujuan bekerja. Di samping itu, Malaysia juga menawarkan berbagai insentif bagi calon pekerja migran, termasuk iming-iming upah yang dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditawarkan di dalam negeri.¹

Hubungan yang terus terjalin antara Indonesia dan Malaysia memunculkan suatu bentuk ketergantungan timbal balik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Interaksi yang terbangun antara kedua negara ini bersifat sangat kompleks. Kompleksitas tersebut justru dapat memperkuat rasa saling percaya. Namun, meskipun hubungan bilateral ini terus berkembang, ketegangan tetap berpotensi muncul dalam berbagai aspek seperti diplomasi, ekonomi, politik, pertahanan, hingga antarwarga negara.² Salah satu contoh terbaru adalah peristiwa yang mengejutkan publik Indonesia, yaitu tindakan aparat keamanan Malaysia yang menembak pekerja migran asal Indonesia, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tanggung jawab Malaysia dalam kasus ini perlu disikapi secara serius dan sistematis. Penyelesaian persoalan semacam ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting hubungan internasional, yang biasanya dijalankan melalui duta besar atau diplomat. Dalam konteks penembakan WNI di Selangor, upaya diplomatik menjadi langkah yang sangat mendesak bagi Indonesia. Salah satu respons konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pengiriman nota diplomatik sebagai bentuk keberatan resmi atas dugaan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya.

Kasus penembakan terhadap pekerja migran nonprosedural di Malaysia menjadi sorotan dan menimbulkan kejanggalan di tengah masyarakat. Dalam insiden tersebut, lima orang menjadi korban, dan satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa ini memicu perdebatan serta menimbulkan reaksi pro dan kontra antara Indonesia dan Malaysia. Situasi ini turut memengaruhi dinamika hubungan bilateral kedua negara. Selain itu, insiden penembakan tersebut menyoroti isu penting mengenai kerentanan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran. Kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia telah menarik perhatian dari berbagai lapisan, mulai dari Presiden, Duta Besar, hingga Kementerian Luar Negeri. Menanggapi insiden tersebut, pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menyarankan agar pernyataan korban disampaikan dalam bentuk sumpah agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui secara resmi.³ Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap kasus ini, hubungan antara Indonesia dan Malaysia menjadi sorotan di mata masyarakat internasional. Terlebih lagi, insiden yang melibatkan aspek diplomatik kedua negara memunculkan berbagai pertanyaan penting. Peristiwa ini juga dapat menjadi bahan kajian akademis bagi praktisi, dosen, dan mahasiswa dalam memahami lebih dalam dinamika hubungan internasional, diplomasi, serta interaksi konsuler antara kedua negara.

¹ Indrianto Prasetio, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <https://repository.unissula.ac.id/25758/>.

² Melyana R. Pugu, *Diplomasi Dan Negosiasi* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

³ Qonita Rakhman, "Penembakan WNI Di Malaysia Dinilai Termasuk Pelanggaran HAM," *metrotvnews.com*, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9JXd-penembakan-wni-di-malaysia-dinilai-termasuk-pelanggaran-ham>.

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, dilakukan perangkuman dan identifikasi terhadap informasi utama yang kemudian dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum dalam meneliti keberlanjutan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Hasil dari penelitian ini dirancang untuk dipublikasikan secara nasional dengan harapan mampu menyajikan data yang relevan dan kredibel. Penelitian ini juga menyoroti langkah diplomatik yang diambil oleh Indonesia melalui penyampaian nota diplomatik terkait insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Selangor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah tanggung jawab pemerintah Malaysia dalam menanggapi nota diplomatik tersebut secara profesional dan transparan. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu jalan menuju keadilan bagi korban WNI.

Dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap data yang telah dihimpun, penulis berhasil merumuskan suatu konsep dalam lingkup hubungan internasional, baik dalam bentuk kerja sama bilateral maupun multilateral. Konsep ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pertimbangan pengambilan keputusan diplomatik antara dua negara. Dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara yang sedang mengalami sengketa, penulis mengkaji norma-norma, hukum kebiasaan internasional, serta aspek hukum internasional lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi awal yang bermanfaat sebagai acuan untuk studi lanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun kalangan akademisi, khususnya mahasiswa yang ingin mendalami pendekatan hubungan internasional yang berkaitan dengan praktik diplomasi dan konsuler agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang semestinya.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui telaah pustaka dan penelusuran literatur relevan seperti jurnal ilmiah, laporan berita, serta dokumen-dokumen terkait. Fokus utama penelitian ini adalah dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Kajian ini berpijak pada prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional, praktik diplomasi internasional, serta status hukum internasional suatu entitas, khususnya mengenai hak perwakilan diplomatik Indonesia dalam menyampaikan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan WNI di wilayah Selangor.

Pemilihan topik disesuaikan dengan urgensi dan keterkaitannya dalam ranah hukum diplomatik, dengan mengadopsi pendekatan ilmu hukum internasional untuk mengkaji isu-isu diplomasi yang muncul. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur berbasis digital, termasuk dari media sosial yang menyajikan informasi formal dan dapat diakses publik, yang kemudian diverifikasi keabsahannya melalui sumber berita resmi lintas negara. Seluruh informasi yang diperoleh dianalisis dalam kerangka hukum internasional serta dikaitkan dengan isu-isu hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kritis dan akademis guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan peraturan yang mengatur interaksi bilateral maupun multilateral, yang dijalankan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler.

METODE PENELITIAN

metode penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, serta jurnal hukum untuk menjadi bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

PEMBAHASAN

Evaluasi Efektivitas Diplomasi Indonesia dalam Mendorong Malaysia Memberikan Tanggapan Resmi dan Memikul Tanggung Jawab

Upaya diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia dalam menuntut tanggung jawab resmi dari pihak Malaysia atas insiden penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Selangor telah dijalankan melalui sejumlah saluran formal, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia secara konsisten mengirimkan nota diplomatik yang berisi pernyataan keberatan, permintaan penjelasan, serta dorongan agar dilakukan penyelidikan secara transparan terhadap aparat yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur juga

turut memainkan peran aktif, baik dalam menjalin komunikasi langsung dengan otoritas Malaysia, maupun dalam mendampingi proses hukum serta memantau jalannya investigasi di lapangan.⁴

Serangkaian langkah diplomatik ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menuntut keadilan dan memastikan perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri, terutama para pekerja migran yang tergolong kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Indonesia telah menyampaikan tekanan diplomatik secara intensif, tanggapan yang diterima dari pemerintah Malaysia sejauh ini masih bersifat umum, minim transparansi, serta belum menunjukkan langkah hukum konkret terhadap pihak yang bertanggung jawab di lapangan. Kendati demikian, pendekatan diplomatik tersebut tetap memiliki nilai strategis sebagai bentuk tekanan politik, ekspresi komitmen negara terhadap perlindungan warganya, serta penguatan posisi Indonesia dalam forum bilateral maupun regional yang membahas isu-isu perlindungan pekerja migran dan HAM.⁵

Respons diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) di Selangor, Malaysia, mencerminkan langkah taktis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keselamatan dan kehormatan warga negaranya di luar negeri. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam sistem hukum dan keamanan di negara tempat mereka bekerja. Sejak awal peristiwa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia segera mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia sebagai bentuk protes resmi dan permintaan penjelasan atas tindakan aparat keamanan yang mengakibatkan kematian WNI tersebut. Di samping itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur turut bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan awal, membantu proses identifikasi jenazah, serta memberikan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi keluarga korban.

Upaya diplomatik yang ditempuh oleh Indonesia tidak sebatas pada pengiriman nota protes, tetapi turut mencakup rangkaian dialog bilateral yang dilaksanakan baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun antara institusi penegak hukum dari kedua negara. Pemerintah Indonesia menuntut agar Malaysia melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab terkait insiden tersebut, serta mengizinkan perwakilan Indonesia untuk turut mengawasi jalannya proses hukum. Dalam beberapa pernyataan resminya, Indonesia menyoroti bahwa kejadian serupa telah berulang kali terjadi, sehingga diperlukan perubahan mendasar dalam sistem keamanan terhadap pekerja migran asing di Malaysia, khususnya yang berasal dari Indonesia. Indonesia juga mendesak agar Malaysia menjamin perlindungan hukum yang setara dan menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta perlindungan hak asasi manusia.⁶

Namun, dalam penerapannya, diplomasi Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan terkait kasus ini. Walaupun sudah dikirimkan nota diplomatik dan tekanan politik secara tidak langsung telah dilakukan, respons dari pihak Malaysia dianggap kurang memuaskan. Pemerintah Malaysia lebih sering memberikan jawaban yang bersifat normatif, misalnya dengan menyatakan bahwa proses penyelidikan tengah berlangsung, tanpa menyertakan rincian konkret atau hasil investigasi yang bisa diverifikasi oleh pihak luar. Kurangnya keterbukaan informasi kepada publik dan lambatnya proses hukum terhadap pelaku menimbulkan kesan bahwa negara tetangga tersebut kurang serius dalam menangani pelanggaran terhadap Warga Negara Indonesia.⁷ Dalam

⁴ Marzuqoh Aulia and Nur Azizah, "Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen Di Malaysia Tahun 2022–2023," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 108–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2984>.

⁵ Ridwan Arifin et al., "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?," *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 561–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271>.

⁶ Asmak Ul Hosnah et al., "Comparison of Malaysian and Indonesian Whistleblower Legal Protection as a Tool for Criminalization Elimination," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 114–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24751>.

⁷ Herawan Sauni et al., "Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 649–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9752>.

konteks ini, diplomasi Indonesia nampak terbatas, khususnya saat menghadapi sikap defensif dari negara penempatan yang berupaya menjaga citra dan kedaulatannya di tengah tekanan eksternal.

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki keterikatan yang kuat secara sejarah, budaya, dan ekonomi, dalam hal perlindungan pekerja migran, posisi Indonesia sering kali lebih lemah. Malaysia, sebagai tujuan utama para tenaga kerja Indonesia, memiliki kepentingan besar dalam mempertahankan pasokan tenaga kerja murah. Namun, di sisi lain, mekanisme perlindungan bagi pekerja asing di Malaysia belum sepenuhnya memenuhi standar yang diatur oleh hukum internasional. Ketidakseimbangan ini menyebabkan negosiasi diplomatik, terutama dalam kasus-kasus seperti penembakan WNI, sering kali menghadapi dilema antara menjaga hubungan bilateral yang baik dan menuntut penegakan keadilan secara tegas. Indonesia harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan hubungan stabil dengan Malaysia sambil terus memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban yang sesungguhnya atas kekerasan yang dialami oleh warganya.⁸

Langkah-langkah diplomatik yang ditempuh Indonesia tetap memiliki signifikansi strategis maupun simbolis. Melalui penyampaian protes resmi, pembicaraan bilateral, serta partisipasi aktif Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Indonesia menunjukkan sikap tidak pasif terhadap tindakan kekerasan yang menimpa warganya.⁹ Upaya tersebut sekaligus memberikan sinyal politik kepada pemerintah Malaysia agar lebih berhati-hati dalam menangani persoalan pekerja migran. Lebih jauh, pendekatan diplomasi ini turut berperan dalam pencatatan internasional yang kelak dapat dijadikan rujukan oleh Indonesia di berbagai forum multilateral seperti ASEAN, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB guna mengangkat isu perlunya perlindungan lintas negara bagi tenaga kerja migran.¹⁰

Dalam rangka memperluas tekanan baik secara moral maupun kelembagaan terhadap Pemerintah Malaysia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mengambil peran strategis dengan mendorong dilakukannya pengawasan independen atas insiden penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Selangor. Secara resmi, Kemenkumham mengimbau Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk menjalankan mandat pemantauannya dengan menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, serta bebas dari pengaruh politik. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal.

Di sisi lain, Kemenkumham turut mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) agar mempererat koordinasi, sebagai bagian dari upaya membangun jejaring solidaritas antar lembaga HAM di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama lintas negara ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum regional seperti Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sehingga dapat mendorong akuntabilitas atas tindakan kekerasan terhadap WNI dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa upaya perlindungan diplomatik tidak semata-mata dilakukan melalui saluran formal kenegaraan atau diplomasi politik, melainkan juga melalui sinergi antar lembaga HAM internasional, yang mampu memberikan tekanan tambahan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih konstruktif di antara elemen masyarakat sipil kedua negara.¹¹ Meskipun langkah-langkah diplomatik Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam memperoleh bentuk

⁸ Tedi Sudrajat, Baginda Khalid Hidayat Jati, and Chander Mohan Gupta, "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i1.10506>.

⁹ Aswin Ariyanto Azis et al., "Indonesia's Approach towards Myanmar's Crisis: Understanding the Different Perspectives of the Democracy Process in Indonesia and Myanmar and the Role of the Military," *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2023): 63–75, <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.17997>.

¹⁰ Dwi Ardhanariswari Sundrijo and Dhanny Safitri, "Migrant Labour Protection in Asean, in What Way Does ILO Matter?," *Global: Jurnal Politik Internasional* 25, no. 2 (2023): 94–114, <https://doi.org/10.7454/global.v25i2.1313>.

¹¹ Muhammad Zahrul Anam, Ahmad Nubail Munir, and Radiva Rusyda Hidayat, "Muhammadiyah Diaspora Diplomacy in Protecting Indonesian Migrant Workers in Malaysia," *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.12533>.

pertanggungjawaban resmi dari Pemerintah Malaysia, konsistensi dalam upaya ini mencerminkan komitmen negara terhadap amanat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara, termasuk mereka yang berada di luar wilayah hukum nasional.

Konsekuensi Negara Malaysia Terhadap Nota Diplomatik Indonesia dalam Perspektif Hubungan Bilateral

Pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia terkait insiden penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Selangor, yang kemudian mendapat tanggapan dari pihak Malaysia. Pemerintah Malaysia menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi secara luas dan transparan kepada Indonesia mengenai kasus tersebut, serta menyetujui pertemuan antara perwakilan Polri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dengan Kepolisian Diraja Malaysia untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Petugas dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), yang diduga terlibat dalam penembakan, telah diberhentikan sementara guna mempermudah proses penyelidikan oleh kepolisian Malaysia. Dalam insiden ini, satu orang WNI juga sedang ditahan oleh kepolisian Selangor, namun hingga saat ini KBRI Kuala Lumpur belum menerima pemberitahuan resmi terkait hak kekonsuleran atas penahanan tersebut. Oleh karena itu, KBRI telah mengajukan nota diplomatik kepada pihak Malaysia guna meminta penjelasan serta akses kekonsuleran bagi WNI yang ditahan.

Tanggapan Malaysia terhadap nota diplomatik yang dikirimkan oleh Indonesia dalam kasus ini memberikan pengaruh penting terhadap hubungan bilateral kedua negara, baik dari aspek diplomasi, hukum, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), maupun persepsi masyarakat. Respon positif dari Malaysia terhadap nota diplomatik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan mempererat kerja sama antara kedua negara. Selain itu, keterbukaan informasi dan transparansi dalam penanganan kasus ini menunjukkan itikad baik untuk menjaga hubungan yang selama ini cukup sensitif, khususnya terkait isu pekerja migran. Dengan diberikan akses konsuler oleh Malaysia, Pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa hak-hak WNI terpenuhi serta proses hukum berjalan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kerja sama yang bersifat kooperatif antara Malaysia dan Indonesia juga berpotensi meredakan ketegangan diplomatik, sehingga menghindari eskalasi konflik di tingkat internasional. Respons yang kooperatif ini juga membuka ruang dialog untuk memperbaiki mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.¹²

Sebaliknya, ketidaktertanggapan Malaysia terhadap nota diplomatik berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya tingkat kepercayaan dan citra negara tersebut di mata publik. Hal ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan diplomatik serta memengaruhi kerja sama bilateral di berbagai bidang. Ketidaktertanggapan dari Malaysia juga berisiko memicu kritik tajam dari masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait yang menuntut perlindungan bagi WNI di luar negeri. Selain itu, sikap tidak merespons kasus ini bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan hukum internasional. Mengingat isu HAM sangat sensitif, ketidaktertanggapan Malaysia juga berpotensi menimbulkan tekanan dari komunitas internasional serta meningkatkan risiko isolasi diplomatik dari Indonesia, terutama dalam kerjasama bilateral yang berkaitan dengan pekerja migran dan sektor-sektor lain yang selama ini dianggap sensitif.

Analisis Efektivitas Mekanisme Diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia dalam Menyelesaikan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap WNI pada Insiden Penembakan di Selangor

Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral yang cukup kuat, yang didorong oleh kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta banyaknya warga negara Indonesia yang mencari penghidupan di Malaysia. Kedekatan ini turut memunculkan berbagai dinamika, khususnya dalam

¹² Yordan Gunawan, Muhammad Arya Ansar, and Siti Asdilla Dzakiyyah, "Navigating the Waters of Conflict : Indonesia and Malaysia's Maritime Boundary Dispute in the Sulawesi Sea and Malacca Straits," *JALREV: Jambura :Aw Review* 7, no. 1 (2025): 152–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.24367>.

bidang ketenagakerjaan dan isu perlindungan hak asasi manusia, yang kerap kali menjadi titik gesekan antara kedua negara. Salah satu contohnya adalah insiden penembakan terhadap WNI di Selangor oleh aparat Malaysia, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penembakan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan WNI dalam tindak kriminal, namun tindakan aparat yang diduga melakukan penyiksaan di luar prosedur hukum jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Dalam situasi semacam ini, respons pemerintah Indonesia sebaiknya tidak berhenti pada protes diplomatik semata, melainkan juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan HAM serta penguatan hubungan diplomatik dengan Malaysia guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

Menanggapi kasus tersebut, pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik dengan mengirimkan nota protes resmi kepada pihak Malaysia. Tidak hanya itu, melalui kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dilakukan investigasi langsung di lokasi kejadian guna memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban beserta keluarganya. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga nasional seperti LPSK dan BP2MI dalam rangka mengumpulkan bukti serta mengungkap fakta-fakta yang melatarbelakangi insiden penembakan oleh aparat Malaysia di wilayah Selangor. Pemerintah Indonesia turut memanfaatkan saluran media dan pernyataan resmi sebagai bentuk tekanan diplomatik agar otoritas Malaysia melakukan penyelidikan yang independen dan transparan.

Melalui berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, kasus ini berhasil menarik perhatian publik dan menjadi sorotan di media massa serta forum bilateral kedua negara. Hal ini mendorong pemerintah Malaysia untuk mengeluarkan pernyataan resmi, meskipun pernyataan tersebut bersifat terbatas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian perkara. Tindakan pemerintah Malaysia patut disayangkan karena tidak menunjukkan upaya penyelesaian yang independen dan transparan, melainkan hanya menyampaikan versi sepihak tanpa ada proses hukum terhadap aparat yang diduga terlibat. Tanggapan Malaysia dalam kasus ini juga dinilai belum memadai, sebab selain memberikan narasi sepihak yang tidak menyeluruh, negara tersebut tidak sepenuhnya membuka ruang untuk dilakukannya penyelidikan bersama antara otoritas Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, insiden penembakan WNI di Selangor belum terungkap secara menyeluruh. Selain itu, tidak ada pemberian kompensasi atau pengakuan atas kesalahan dari pihak Malaysia, yang menyebabkan keadilan bagi korban dan keluarga belum terpenuhi. Peran ASEAN sebagai organisasi regional juga tidak dimanfaatkan secara optimal karena prinsip non-intervensi yang dianut membatasi ruang diplomasi multilateral dalam menyelesaikan konflik semacam ini.

Respons Malaysia terhadap upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kasus penembakan WNI di Selangor terkesan kurang sigap, tidak independen, dan kurang transparan. Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme diplomatik dalam penyelesaian kasus tersebut belum berjalan secara optimal dan masih bersifat terbatas, mengingat tidak adanya hasil konkret atas pelanggaran HAM yang terjadi. Tidak terdapat penyelidikan independen dari pihak Malaysia, tidak ada pertanggungjawaban hukum yang jelas, serta minimnya upaya pemulihan hak-hak korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia masih belum cukup kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di ranah hubungan bilateral.¹³ Salah satu tantangan utama dari lemahnya efektivitas mekanisme diplomatik ini adalah posisi tawar Indonesia yang lemah dalam isu HAM serta keberadaan prinsip non-intervensi yang dianut dalam kerangka hubungan regional ASEAN. Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan upaya aktif dan tidak tinggal diam dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi warga negaranya, walaupun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.¹⁴

¹³ Pika Sari et al., "Comparison of Legal in Granting the Rights of Retitution To Victims of Sexual Violence," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4485>.

¹⁴ Zain Maulana and Husni Amriyanto Putra, "The Reform and Evolution of ASEAN Human Rights Regime: A Communicative Action Perspective," *JAS: Journal of ASEAN Studies* 12, no. 1 (2024): 185–207, <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.9668>.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatik formal, seperti penyampaian nota protes dan dialog bilateral, dalam menuntut pertanggungjawaban Malaysia atas insiden penembakan WNI di Selangor. Namun, efektivitas langkah ini masih terbatas akibat respons Malaysia yang cenderung normatif dan kurang konkret, serta dipengaruhi oleh posisi negosiasi Indonesia yang lemah dan kendala prinsip nonintervensi dalam kerangka ASEAN. Ketidakresponsifan Malaysia tidak hanya berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia memperkuat strategi diplomasi dengan mengedepankan pendekatan multilateral, seperti melalui ASEAN atau PBB, guna menekan Malaysia agar memberikan respons yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan mekanisme perlindungan hukum dan advokasi bagi WNI di luar negeri dengan melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil, demi menjamin perlindungan hak-hak WNI serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan

Saran

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat strategi diplomasi dengan tidak hanya mengandalkan pendekatan bilateral, tetapi juga mengoptimalkan mekanisme multilateral melalui ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong Malaysia agar memberikan respons yang lebih transparan dan akuntabel atas insiden penembakan WNI. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum dan advokasi bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri melalui kerja sama lintas sektor, guna menjamin pemenuhan hak-hak WNI serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

REFERENSI

Buku

Pugu, Melyana R. *Diplomasi Dan Negosiasi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Indonesia, 2010.

Jurnal Penelitian

- Anam, Muhammad Zahrul, Ahmad Nubail Munir, and Radiva Rusyda Hidayat. "Muhammadiyah Diaspora Diplomacy in Protecting Indonesian Migrant Workers in Malaysia." *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.12533>.
- Arifin, Ridwan, Riska Alkadri, Robert Brian Smith, Nucharee Nuchkoom Smith, and Wahyudin. "Indonesia's New Penal Code: Harmonizing with Global Justice or Defying International Norms?" *Lex Scientia Law Review* 8, no. 1 (2024): 561–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14271>.
- Aulia, Marzuqoh, and Nur Azizah. "Strategi KBRI Kuala Lumpur Dalam Perlindungan Kewarganegaraan: Studi WNI Tidak Berdokumen Di Malaysia Tahun 2022–2023." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 1 (2024): 108–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2984>.
- Azis, Aswin Ariyanto, Firstyarinda Valentina Indraswari, Annisa Ridhatul Khatimah, and A. Qalbi Faathimah Azzahra. "Indonesia's Approach towards Myanmar's Crisis: Understanding the Different Perspectives of the Democracy Process in Indonesia and Myanmar and the Role of the Military." *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2023): 63–75. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.17997>.

- Gunawan, Yordan, Muhammad Arya Ansar, and Siti Asdilla Dzakiyyah. "Navigating the Waters of Conflict : Indonesia and Malaysia's Maritime Boundary Dispute in the Sulawesi Sea and Malacca Straits." *JALREV: Jambura :Aw Review* 7, no. 1 (2025): 152–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.24367>.
- Hosnah, Asmak Ul, Norhasliza binti Ghapa, Henny Nuraeny, Sapto Handoyo Djarkasih Putro, and Lilik Prihatini. "Comparison of Malaysian and Indonesian Whistleblower Legal Protection as a Tool for Criminalization Elimination." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 114–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24751>.
- Maulana, Zain, and Husni Amriyanto Putra. "The Reform and Evolution of ASEAN Human Rights Regime: A Communicative Action Perspective." *JAS: Journal of ASEAN Studies* 12, no. 1 (2024): 185–207. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.9668>.
- Sari, Pika, Toto Yanuarto, Effendi Setyawan, and Bhim Prakoso. "Comparison of Legal in Granting the Rights of Retitution To Victims of Sexual Violence." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4485>.
- Sauni, Herawan, Zico Junius Fernando, David Aprizon Putra, Saivol Virdaus, and Aris Hardinanto. "Beyond Borders: Shedding Light on Foreign Bribery through an Islamic Legal Lens." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 649–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.9752>.
- Sudrajat, Tedi, Baginda Khalid Hidayat Jati, and Chander Mohan Gupta. "Questioning Indonesia's Role in Addressing Rohingya Refugees: A Legal, Humanitarian, and State Responsibility Perspective." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i1.10506>.
- Sundrijo, Dwi Ardhanariswari, and Dhanny Safitri. "Migrant Labour Protection in Asean, in What Way Does ILO Matter?" *Global: Jurnal Politik Internasional* 25, no. 2 (2023): 94–114. <https://doi.org/10.7454/global.v25i2.1313>.

A. Skripsi

- Prasetyo, Indrianto. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/25758/>.

B. Website

- Rakhman, Qonita. "Penembakan WNI Di Malaysia Dinilai Termasuk Pelanggaran HAM." *metrotvnews.com*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/N0BC9JXd-penembakan-wni-di-malaysia-dinilai-termasuk-pelanggaran-ham>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri